

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berusaha untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu usahanya adalah dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara sebagai instrument utama untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi pada tahun 2029. Pembentukan BPI Danantara ditujukan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan asset negara dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik negara dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Didukung pula dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa BPI Danantara tidak hanya ditujukan sebagai badan pengelola inverstasi melainkan juga diposisikan sebgai perangkan strategis yang bertugas untuk mentransformasikan perekonomian nasional dengan memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan Masyarakat (Simorangkir, 2025). (Kemenkeu RI, 25: Ulya& Belarminur,2025). Danantara dikonsepkan sebagai *sovereign wealth fund* Indonesia yang rancangan seperti Tamasek dari Singapura yang mengelola asset BUMN senilai lebih dari \$900 miliar yang akan digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui regulasi dan optimasi investasi pemerintah (Cahyono et al., 2025).

BPI Danantara sebagai *super holdings* tentu memerlukan banyak dukungan berupa sumber daya manusia yang memiliki reputasi dan *background* yang mumpuni di bidangnya. Selain itu, diperlukan juga kerja sama yang baik antara pihak-pihak internal maupun external dalam hal ini adalah pemerintah, DPR, serta pihak pemangku lainnya untuk menyokong BPI Danantara agar dapat memiliki ekosistem investasi yang aman dan berkelanjutan. Eksistensi BPI Danantara dapat berpotensi melemah jika adanya ketidakstabilan regulasi dalam sistem birokrasi Indonesia, sebagai contohnya perubahan kebijakan yang kerap kali berganti dan campur tangan politik yang berlebih (Hidayati, R. 2025). Seperti halnya posisi sebagai penasihat di Danantara, peran penasihat adalah untuk memberikan pandangan dan perspektif strategis dalam investasi terutama terkait risiko ekonomi makro dan dinamika geopolitik dunia. Meskipun dalam praktiknya, penasihat tidak memiliki wewenang secara langsung dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan alokasi dana, peran penasihatnya berpotensi mempengaruhi terbentuknya strategi jangka panjang sejumlah investasi triliunan rupiah yang berpengaruh terhadap kepercayaan investor global. Sehingga jelas status hukum dan jejak penasihat mencerminkan standar tata kelola Danantara.

Keputusan Prabowo untuk menunjuk mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra sebagai sebagai dewan penasihat BPI resmi diumumkan oleh Rosan Roeslani selaku *Chief Executive Officer* Danantara pada bulan Februari 2025. Penunjukan langsung Thaksin sebagai penasihat Danantara oleh Prabowo dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial mengingat selama periode kepemimpinan Thaksin Shinawatra sebagai Perdana Menteri, Thaksin

mendapatkan berbagai jeratan hukum. Thaksin mendapatkan kritikan keras setelah diduga melakukan penyelewengan kekuasaan dengan menjual asset penting nasional yaitu kepemilikan saham Shin Corporation keluarga Shinawatra kepada Tamasek Holdings. Pada tahun 2019, Thaksin kembali dijatuhi hukuman oleh pemerintah Thailand dalam kasus pinjaman berbunga rendah sebesar 4 miliar bath kepada pemerintah Myanmar dengan tujuan agar pemerintah Myanmar dapat membeli produk perusahaan keluarga Shinawatra, yaitu Shin Satellite Plc. Kasus lain yang menambah daftar hitam karier politik Thaksin adalah Thaksin dituduhkan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam program Lotere dua-digit & tiga-digit yang dianggap menyalahi aturan (tidak sah secara hukum) dan berakhir dengan merugikan negara Thailand. Thaksin dikenakan hukuman in absentia karena Thaksin telah menghabiskan periode panjang dalam pengasingan selama 15 tahun, dan warisannya tetap menjadi isu yang kontroversial, dengan pendukung dan penentang terbagi menjadi kubu pro-Thaksin dan anti-Thaksin (ทามาศ et al., 2023).

Keputusan Prabowo dalam menunjuk Thaksin sebagai penasihat Danantara menarik untuk di kaji mengingat berdasarkan latar belakangnya, Thaksin merupakan seorang politisi dengan rentang sejarah yang kontroversial bukan sekedar figur teknis-profesional biasa. Dalam ilmu Hubungan Internasional, keputusan kebijakan luar negeri kerap kali dipengaruhi oleh *belief system* dan *worldview* pemimpin yang terbentuk dari latar belakang masa lalu mereka. Selaras dengan rekam jejak Prabowo yang kerap menunjukkan pola penggunaan memori personal untuk melegitimasi kebijakannya, yaitu seperti: (1) Memori mengenai

mengenai dua panglima Jepang pada masa perang saudara, Toyotomi Hideyoshi yang menawarkan persatuan kepada Tokugawa Iyeyasu serta memori mengenai Presiden Amerika yaitu Abraham Lincoln yang memilih lawan politiknya William H. Seward untuk menjadi *Secretary of State* (Menteri Luar Negeri) dalam kabinetnya karena Abraham Lincoln demi Bersatu untuk membangun negara meskipun mereka adalah rival untuk melegitimasi keputusannya bergabung dalam kabinet kepemimpinan Presiden Joko Widodo, (2) Memori Prabowo sebagai ABRI serta embargo Amerika Serikat pada tahun 1999 yang digunakan untuk melegitimasi kebijakan modernisasi alutsista saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan, (3) Memori masa lalu Prabowo sebagai *Third Culture Kids* serta memori pemikiran ayahnya untuk melegitimasi kebijakan Makan Bergizi Gratis. Selain itu, baik Prabowo dan Thaksin keduanya memiliki kesamaan dalam perjalanan karir politik seperti menghadapi tuduhan pelanggaran HAM, mengalami periode "*politic setback*" atau kegagalan politik namun keduanya berakhir sukses dengan kembali ke dunia politik. Rekam jejak menunjukkan bahwa Prabowo dan Thaksin sudah membangun kedekatan personal sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dengan melakukan pertemuan dalam jamuan makan malam di Bangkok pada September 2024. Pertemuan yang terjadi sebelum Prabowo diangkat sebagai Presiden serta sebelum terbentuknya kebijakan penunjukan menunjukkan adanya usaha *strategic networking* yang dilakukan Prabowo. Dalam *interview* "Prabowo Menjawab", Prabowo secara eksplisit menyampaikan alasan penunjukan Thaksin disebabkan oleh jaringan dan pengalaman besar yang dimiliki oleh Thaksin serta kesediannya untuk bekerja

tanpa kompensasi. Alasan yang disampaikan oleh Prabowo dalam pengambilan keputusan tersebut memunculkan adanya indikasi perhitungan strategis yang didasari oleh pengalaman pribadi. Pernyataan lain dalam *interview* untuk melegitimasi keputusannya, yaitu "Banyak tokoh-tokoh lain di luar sana yang memiliki kasus yang sama, termasuk saya." memperkuat adanya penggunaan memori sebagai bentuk '*shared trauma*' yang disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pengambilan keputusannya memilih Thaksin sebagai penasihat Danantara.

Di Indonesia, penelitian mengenai *autobiographical memory* dalam *decision-making* terbilang masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan penelitian mengenai *foreign policy decision-making* di Indonesia didominasi oleh *focus* pada analisis level sistemik (struktur internasional), domestik (politik dalam negeri, ekonomi), dan institusional (birokrasi, Lembaga). Penelitian yang melakukan analisis pada: (1) level individual tentang bagaimana pengalaman personal pemimpin membentuk sebuah kebijakan, (2) *Memory politics* tentang bagaimana memori politik mempengaruhi pilihan strategis, dan (3) *Psychological dimension* tentang bagaimana *lesson learned* di terjemahkan ke dalam sebuah kebijakan luar negeri masih sangat terbatas.

Penelitian ini berusaha mengisi gap dengan melakukan analisis *autobiography memory* politik Prabowo sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan penunjukan Thaksin dengan menggunakan teori *Autobiographical Memory Functions* (Bluck and Alea, 2002) untuk menguraikan bagaimana memori seorang individu dapat mempengaruhi identitas, cara berkomunikasi, tindakan seorang Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara yang menjalankan

pemerintahan, dan *Politics of Memory* (Verovšek, 2016) untuk menjabarkan bagaimana memori politik Prabowo di rekonstruksi dan diimplementasikan untuk melegitimasi sebuah kebijakan menyentuh interaksi aspek politik memori untuk melegitimasi kebijakannya sebagai rasionalisasi kebijakan politik yang ia nilai sebagai hal yang pragmatis dan memiliki nilai similaritas dengan background nya. Dengan kata lain Prabowo memanggil kembali fragmen masa lalu (memori politik) untuk menjustifikasi kerja sama strategis ini di ruang publik (politik memori).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *"Bagaimana memori autobiografis politik Prabowo Subianto mempengaruhi keputusan penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat Danantara?"*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi bagaimana autobiografis memori politik Prabowo mempengaruhi keputusan Prabowo dalam menunjuk Thaksin sebagai penasihat Danantara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka manfaat penelitian adalah untuk memperkaya literatur studi Hubungan Internasional khususnya mengenai memori politik dalam pengambilan keputusan seorang aktor Hubungan Internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk dapat memberikan alur pemikiran terstruktur untuk membedah *Autobiographical Memori*

Politik Prabowo dalam Kebijakan Penunjukan Thaksin Shinawatra. Penyusunan di urutkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu kebijakan penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat Danantara oleh Prabowo Subianto. Di dalamnya di uraikan pula rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan penelitian yang akan diuraikan di setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan landasan teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian, yaitu penelitian mengenai autobiographical memori dan memori politik yang dikembangkan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian juga dibahas untuk menggambarkan gap yang coba dijawab dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, menguraikan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode analisis historical inquiry dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis topik penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, menguraikan tentang hasil dan pembahasan permasalahan dengan menggunakan teori autobiographical memori dan memori politik. Fokus penelitian ini adalah untuk mencari tau faktor autobiographical memori politik Prabowo sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan penunjukan Thaksin Shinawatra sebagai penasihat Danantara.

BAB V PENUTUPAN DAN KESIMPULAN, menyimpulkan hasil utama dari temuan yang dilakukan dalam penelitian. Dalam bab ini di rangkum bagaimana

memori politik autobiographis Prabowo dapat mempengaruhi kebijakan yang dicetuskan pada masa periode kepemimpinannya.

